

BELAJAR DEMOKRATISASI DIRI DAN DEMOKRATISASI DALAM STRUKTUR

Oleh: Bedjo Sukarno

Abstract: Democracy gives complete freedom to every individual to realize himself and to actual all human potentials and talents become aware of his identity intact. democracy gives progress, convenience, besides that it also gives effect changes such as political crises, shock, dissatisfaction, annoyance. Democracy also carries consequences beyond the personal democratization and democratization of political structures.

Key words: democratization, identity, political structures.

PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam arti luas yakni seluruh individu dan kelompok, yang berinteraksi dengan pemerintah tidak hanya kelompok dan organisasi masyarakat, tetapi juga individu anggota masyarakat. Kegiatan memilih wakil rakyat atau pimpinan politik dan pemerintahan serta kegiatan-kegiatan lain seperti upaya mempengaruhi pejabat pemerintah dengan kontak pribadi dan mengirim surat tentang partisipasi politik pada umumnya merupakan sejumlah contoh interaksi individu anggota masyarakat dengan pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan Aristoteles, bahwa manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakekat manusia untuk hidup dalam ketatanegaraan. Hanya dalam ketatanegaraan itu manusia dapat memperoleh sifat moral yang paling tinggi, karena disana urusan-urusan dengan seluruh masyarakat akan dibicarakan dan diperdebatkan, dan tindakan-tindakan untuk mewujudkan kebaikan bersama akan diambil. (Ramlan Surbakti, 1992)

Sementara itu, watak manusia yang cenderung berkelompok, dan karena kelompok dan organisasi dianggap lebih efektif mempengaruhi pemerintah dari pada secara individual, maka di dalam masyarakat di kenal ada berbagai pengelompokan. Dari segi status social dan status ekonomi dikenal pengelompokan masyarakat di kalangan atas, menengah, dan bawah. Secara kultural dikenal pengelompokan berdasarkan suku, agama dan ras. Dari segi klas dikenal pengelompokan dikenal pengelompokan masyarakat pemilik modal dan pekerja. Kemudian dari segi politik dikenal

pengelompokan berdasarkan kepentingan, dan pengelompokan berdasarkan platform politik atau dalam hal ini partai-partai politik serta menurut kekuasaan adalah elite dan khalayak.

Politik bukan lagi hal-hal yang berkaitan dengan Negara dan pemerintah saja, sebab konflik, keputusan dan masalah-masalah umum sering menjadi masalah politik pada saat pemerintah diikutsertakan dalam penyelesaian masalah tersebut, atau justru ditolak mengadakan intervensi terhadap penyelesaian masalahnya. Seseorang yang mahir dalam melakukan praktek politik atau seseorang yang mempelajari dan punya profesi melakukan politik dinamakan politikus. Politikus juga diartikan sebagai perwakilan dari kelompok-kelompok dan individu-individu yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan dan kebijakan politik yang sesuai dengan tujuan-tujuan akhir dan visi kemasyarakatan dari kelompok-kelompok dan individu-individu tersebut.

Dengan kemerdekaan dan hak azasinya manusia bisa menjadi subyek dalam kehidupan bersamanya. Manusia dapat berinisiatif dan belajar secara kreatif turut membina masyarakatnya. Tetapi jika suatu masalah sudah merupakan hasil musyawarah dan menjadi kesepakatan bersama, maka manusia berkewajiban tunduk kepada ketentuan atau konsensus bersama itu.

Sistem sosial yang menjunjung tinggi terwujudnya hak azasi dan kewajiban manusia secara berimbang, lazimnya disebut sistem demokrasi. Dengan demikian jelas pulalah bahwa demokrasi melekat erat pada

kehidupan manusia bersama. Manusia memerlukan demokrasi dalam pengaturan kehidupan bersamanya, yang memberi kemungkinan bagi berkembangnya segala inisiatif dan kreativitasnya.

Dukungan terhadap eksistensi demokrasi di Indonesia datang dari dua actor kunci yaitu elite dan akar rumput. Namun, harus dicatat bahwa dukungan itu bukanlah harga mati, bahkan jika kita mau berpikir lebih kritis dua fondasi demokrasi yang ada saat ini dapat dikatakan rapuh.

Adanya indikasi formal oligarki dalam politik Indonesia menunjukkan bahwa toleransi elite terhadap dominasi individu atau kelompok tertentu sudah mulai muncul. Untuk sekarang ini, masih belum berhasilnya proses politik dalam demokrasi kita untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik dan adanya indikasi meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat mengikis secara signifikan dukungan dan kepuasan publik terhadap demokrasi. Jadi, masa depan demokrasi di Indonesia masih dirundung ketidakpastian

POLITIK

Sebelum merumuskan konsep politik, terdapat beberapa hal anggapan yang lebih mendasarinya diantaranya terjadi dalam setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi. Di dalam kelompok yang dominan di masyarakat ikut serta dalam proses pendistribusian dan pengalokasian sumber-sumber melalui keputusan politik sebagai upaya menegakkan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal itu, pemerintah mengalokasikan sumber-sumber yang langka pada beberapa kelompok dan individu, tetapi tidak mengalokasikan sumber-sumber itu kepada kelompok dan individu yang lain.

Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan pernah menguntungkan semua pihak. Perkembangan dari kebijakan pemerintah tersebut yang tidak obyektif, berakibat ada tekanan-tekanan berupa petisi, demonstrasi, protes, huru-hara dan perdebatan dalam proses pemilihan umum yang berasal dari golongan yang tidak puas terhadap pola distribusi

sumber yang ada merupakan gejala umum dalam masyarakat.

Meluasnya tekanan-tekanan maka kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dari pola distribusi sumber yang ada berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan. Makin mampu penguasa meyakinkan masyarakat umum bahwa sistem politik yang ada memiliki keabsahan maka makin mantap kedudukan penguasa dan kelompok yang diuntungkan dalam perjuangan mereka menghadapi golongan yang menghendaki perubahan.

Pada setiap masyarakat, penguasa berusaha mempertahankan kekuasaannya yang istimewa, upaya itu dilakukan dengan mencari pembenaran-pembenaran dalam bentuk ideologi, ajaran agama, dan formula-formula politik lainnya. Maksudnya, penguasa acapkali melakukan pembohongan atau setengah benar, setengah bohong untuk meyakinkan masyarakat.

Politik tetap merupakan the art of the possible banyak kebijakan ideal yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat ternyata hanya berupa pemecahan yang semu sebab sulit dilaksanakan dalam kenyataan. Dalam dunia nyata, ada pelbagai kendala yang berupa watak manusia, kekuasaan, pranata-pranata social dan kelangkaan teknologi, serta factor tak terduga yang lain yang membatasi apa yang secara aktual dapat dilakukan.

Dalam politik tidak ada yang serba gratis, maksudnya setiap aksi yang dilakukan selalu ada ongkos yang harus dibayar atau resiko yang mesti ditanggung. Sama halnya manusia yang sukar mengharapkan tercapainya semua nilai dan tujuan yang ditetapkan karena tujuan yang satu akan merugikan pada sisi yang lain. Tuntutan perluasan demokrasi berupa kontrol masyarakat yang semakin besar atas penyelenggaraan pemerintahan mungkin akan mengurangi efektivitas pemerintahan. Sementara itu, pemerintahan yang semakin efektif, mungkin menghendaki pertanggungjawaban pemerintah yang terbatas pada masyarakat umum.

David Easton melihat kehidupan politik sebagai satu sistem tingkah laku yang beroperasi di dalam dan mereaksi terhadap lingkungan sosialnya, seraya menyajikan

alokasi nilai-nilai yang mengikat (Kartini Kartono, 1996-5). Dalam sistem politik unsur paling penting ialah pembagian nilai-nilai terutama nilai kesejahteraan, keadilan dan keamanan bagi setiap warganegara dan untuk semua masyarakat. Dengan begitu, politik erat menyangkut pengambilan kebijakan pemerintah, yang secara normatif harus bersih dan adil.

Oleh K.W. Deuttsch mengenai politik (Kartini Kartono, 1996-7) mengatakan politik dan pemerintah itu pada esensinya tampil sebagai proses-proses pengendalian dan pengordinasian usaha-usaha insani dalam mencapai beberapa perangkat tujuan. Satu kelompok akan muncul apabila berlangsung relasi-relasi yang berulang-ulang atau terus-menerus diantara individu dengan individu lain, kemudian diorganisir cukup baik untuk mendorong terjadinya aktivitas-aktivitas yang bertujuan, khususnya tujuan-tujuan politik.

Terbentuknya macam-macam perubahan sosial, disebabkan oleh munculnya kelompok-kelompok sosial baru yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu lewat jalur politik. Pluralisme di tengah masyarakat manusia dengan macam-macam bentuk, pengorganisasian, tujuan atau kepentingan, dan fungsinya menyebabkan setiap kelompok mendapatkan kesempatan yang sama besarnya untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing guna mendapatkan kekuasaan politik.

Nilai-nilai penting dalam politik antara lain ialah keamanan, kebebasan, kesejahteraan, keadilan, kesamaan kesempatan untuk berkembang dan kebersamaan. Maka keadilan dan kesejahteraan itu dalam kehidupan sehari-hari merupakan barang-barang langka yang tidak bisa diperoleh secara otomatis, dan tidak bisa dibeli dipasaran bebas. Untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut diperlukan lebih banyak politik.

Dilihat dari struktur dan kelembagaannya, politik dapat diartikan sebagai berikut;

Segala sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan seperti peraturan, tindakan pemerintah, undang-undang, hukum, kebijakan dan kekuasaan serta lain-lainnya. Pengaturan dan penguasaan oleh

pemerintah atau negara. cara memerintah suatu teritorium tertentu. organisasi, taktik strategi, tindakan negara/pemerintah dalam mengendalikan negara dan wilayahnya secara yuridis dan konstitusional.

Ilmu pengetahuan mengenai kekuasaan.

Pengertian politik terbagi dari beberapa kategori antara lain ;

Secara institusional dan hukum kenegaraan, ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan tentang negara dengan struktur-struktur bagiannya seperti pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan lembaga pengadilan. Suatu perkumpulan yang bersifat politik, jika kekuasaan dan pengaturannya berlangsung berkesinambungan dalam satu kesatuan teritorial tertentu, dengan menggunakan kekuasaan fisik dan ancaman-ancaman melalui satu bentuk pemerintahan administratif. Dengan demikian politik sifatnya sangat dinamis dan kreatif, dengan dimensi pokok berupa perubahan-perubahan secara berkesinambungan.

Politik sebagai pola menetap dari relasi manusia yang berkepentingan dengan masalah kekuasaan, hukum, dan kewibawaan pemerintah. Maka aktivitas individu dan kelompok dari struktur keluarga sampai organisasi nasional dan internasional harus menyibukkan diri untuk mengatur masyarakat dan negara demi pencapaian keadilan dan kesejahteraan bersama.

PROGRESIF DAN DEMOKRATIS

Ketika kebebasan terbuka lebar, maka semua pihak secara kasat mata bisa melihat dan terlibat dalam sebuah keputusan politik. Totalitarianisme hanya mungkin tumbuh subur ketika kekuatan sipil dibungkam. Mengikuti proses pendidikan politik menjadi tidak beralasan, karena *pertama*, mekanisme terbukanya ruang publik menyebabkan setiap individu memiliki kesempatan dalam mengekspresikan sikap politiknya. Ruang publik adalah medan keterbukaan dimana kebebasan dan keterjaminan betul-betul tumbuh dan dibiarkan hidup seluas-luasnya tanpa intervensi yang membatasinya. Kebebasan untuk berdemonstrasi, menyatakan pendapat, sampai dengan kebebasan pers wajib terjamin oleh pemerintah.

Memang ruang publik dalam konteks

demokrasi di Indonesia belumlah seutuh dan sebaik negara demokrasi yang maju, seringkali kebebasan dipakai sebagian kalangan untuk memaksakan pendapatnya secara berlebihan, dengan pamer kekuatan aksi massa dan terror kekerasan. Mengejalanya sektarianisme yang terkesan bebas menyebarkan teror dan ketakutan bagi sebagian kalangan merupakan bukti empiris bahwa demokrasi masih belum berjalan sempurna.

Laju demokratisasi politik seseorang belum seperti yang diharapkan, peningkatan demokrasi politik individu atau warganegara yang mengandung makna berikut, bahwa penghargaan terhadap kedaulatan yang melekat pada setiap insani individu, penghargaan terhadap kesetaraan yang dalam demokrasi ditandai dengan prinsip hak pilih universal, perluasan partisipasi politik, baik sebagai pemilih atau politisi.

Meningkatnya demokrasi politik, menunjukkan kesadaran terhadap tindakan alternative, tindakan alternative adalah kebijakan dalam bentuk memoderasi ketentuan atau memberikan kemudahan akibat tekanan cultural dan struktural. Strategi utama bagi peningkatan kualitas warganegara adalah memperbaiki kualitas pribadi, komitmen kerakyatan dan profesionalitas.

Kedua, hal tersebut di atas belum terlihat konsisten pada aktivis politisi. Mekanisme kontrol sosial telah menjadikan demokrasi lebih melembaga dalam setiap lapisan di masyarakat luas. Kontrol sosial telah menjadi fenomena tersendiri yang menembus batasan sampai tingkat sampai tingkat yang paling kecil. Mekanisme kontrol sosial ini mensyaratkan keberanian untuk berperan secara bersama-sama, kebersamaan ini telah ada dan menjadi tradisi di dalam masyarakat Indonesia. Bahkan wajib diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk membangun diri sendiri dan membangun masyarakat lingkungannya termasuk negara, untuk bisa maju dan berkesjahteraan.

Warganegara juga diharapkan ikut aktif mendinamisir dan memodernisir lembaga-lembaga masyarakat serta system politik yang ada menjadi maju dan sehat. Kelompok elite yang kecil jumlahnya dan para pemimpin itu jelas tidak bisa membangun

sendirian tanpa dukungan rakyat, yaitu membangun negara Indonesia yang begitu luas wilayahnya dan begitu banyak penduduknya, serta sangat bervariasi kondisi kulturalnya.

Semua usaha pembangunan itu hanya bisa berhasil dengan bantuan partisipasi rakyat, untuk itu rakyat supaya di dorong agar ikut merivisi dan merenovasi institusi kemasyarakatan dan perlembagaan politik, untuk mencegah teknokrasi otoritar yang men- dehumanisir rakyat, mencegah overbirokratisasi yang sering memacetkan pembangunan, membrantas korupsi yang merajalela, dan menentang tirani personal dari elite penguasa.

Belajar melalui melalui pendidikan politik merupakan proses demokratisasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi, dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunitas politik yang modern. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dan azas tatanan kenegaraan menjamin kebebasan individu, akan tetapi juga menagih pertanggung jawaban etis setiap orang dalam melaksanakan fungsi sosial dan fungsi publiknya. Dengan demikian rakyat itu membantu melaksanakan proses demokratisasi yang lebih lanjut dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya.

Demokrasi menyajikan pluralisasi (kemajemukan, kebinekaan) dan dinamisasi masyarakatnya, dengan unsur-unsur yang melekat di dalamnya yaitu pertentangan, tegangan, konflik yang bisa dipahami, namun juga bisa dikendalikan atau dimasnage. Sangat rumitnya keterkaitan antara masalah-masalah kemasyarakatan dengan aspek-aspek politik, membuat kebanyakan warga negara semakin sulit memahami dimensi kemasyarakatan dan dimensi politik dari eksistensi dirinya. Juga sukar mengenali hak-hak politik dan peranan politiknya, bahkan lemah tak berdaya menghadapi sergapan pengaruh-pengaruh politik dari luar. (Kartini Kartono, 1996-58) Pada umumnya rakyat tidak mampu memberikan pengaruh politik sedikitpun terhadap keputusan-keputusan politik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Secara populair dikatakan masyarakat itu semata-mata merupakan obyek politik belaka.

Dalam menyadarkan fungsi politik setiap individu untuk menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam proses politik, tujuannya ialah agar supaya pemerintah yang menerapkan kekuasaan dan pengambilan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh warganegara di tengah banyak konflik dan perbedaan kepentingan itu bisa dipengaruhi oleh rakyat. Sebab partisipasi rakyat dalam mempengaruhi kebijakan politik kenegaraan di semua sendi dan sector itu dianggap perlu.

Tak bisa tidak pertumbuhan negara demokrasi yang semakin maju itu akan menyebabkan keterlilitan antara kekuasaan pemerintah dengan aspirasi rakyat, untuk bersama-sama membangun negara dan bangsa. Maka politik pada hakekatnya merupakan penggunaan kekuasaan yang menyangkut mati hidupnya segenap lapisan rakyat dan masyarakat tanpa kecuali. Oleh karena itu rakyat berhak pula untuk mengawasi operasionalisasi kekuasaan pemerintah agar berjalan lurus, bersih, adil dan benar.

Sebab itu, peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalulintas kemasyarakatan yang semakin padat dan menghadapi penyakit sosial. Di samping mengenai kekuasaan juga memahami mekanismenya, serta ikut mengendalikan atau mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat. Dengan demikian, dalam pembentukan pribadi manusia sebagai partisipan politik yang baik dan aktif diharapkan setiap orang harus memiliki infoemasi politik agar ia mempunyai wawasan luas terhadap peristiwa-peristiwa politik.

Selain itu, juga diharapkan mampu menentukan sikap-sikap politik yang sehat dan realistik dalam menentukan pilihan politik dan mempersiapkan diri sebagai pelaku politik yang baik dan trampil. Dapat melakukan banyak kebijakan politik di tengah lingkungan dekat, sampai lebih luas lagi yaitu lingkungan negara.

Dalam memahami politik yaitu berusaha membawa individu pada konsentrasi diri lebih baik lagi dan tidak bersikap apatis manangisi kemalangan nasib dengan rasa putus asa. Untuk memiliki fondasi yang kuat dalam menentukan sikap

politik, harus memilih alternative politik yang sesuai dan tepat, dengan tujuan membangkitkan rasa tanggung jawab warganegara dalam satu demokrasi politik dan ada kemauan untuk berbuat benar dan lebih baik lagi.

Maka dalam proses politik itu tidak hanya diperlukan pemahaman tentang politik dan kemasyarakatan yang tengah berlaku saja, tetapi belajar dalam menjalankan fungsi kewarganegaraan dalam kader-kader politik yang ada, namun lebih banyak ditujukan pada pemilihan alternative politik paling baik untuk masa mendatang. Di sisi lain, sangat berkepentingan dengan proses menjadi dinamika yang lebih progresif.

DEMOKRATISASI DIRI DAN DEMOKRATISASI STRUKTUR POLITIK

Dalam system demokrasi adalah untuk menjunjung tinggi kemitraan rakyat dan persekutuan dengan rakyat, rasa solidaritas dan loyalitas sangat dijunjung tinggi berdasarkan persamaan sepenanggungan, persamaan status selaku warganegara, dan persamaan historis. Dalam kondisi sedemikian rakyat secara loyal akan ikut menentukan kebijakan publik, mengenai kesejahteraan umum. Juga ikut memecahkan masalah-masalah Negara dan masalah sosial. Bagi rakyat politik merupakan peneunaan kekuasaan negara untuk menyelesaikan masalah-masalah negara dan rakyat, yang dilakukan oleh aparatur pemerintah bersama-sama dengan rakyat demi kesejahteraan seluruh warganegara. Sebab politik itu segala sesuatu yang diperjuangkan dan terus menerus diperjuangkan dari berbagai hal yang belum terjadi dan diusahakan sampai benar-benar terjadi.

Di satu sisi demokrasi ini memberikan kemajuan, kemudahan, dan pembantuan, namun di samping itu juga memberikan dampak perubahan-perubahan seperti terjadinya krisis politik, guncangan, ketidakpuasan, kejengkelan dan kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa dilakukan, diharapkan terjadinya di masa-masa mendatang. Demokrasi juga membawa konsekwensi lebih jauh lagi yaitu demokratisasi pribadi serta demokratisasi struktur kemasyarakatan maupun struktur politik.

Untuk itu, dalam proses pembelajaran politik diarahkan pada upaya mengubah sikap-sikap politik individu saja, tetapi juga memberikan saham terhadap pembaharuan system politik dan lembaga politik dan perubahan pada struktur masyarakat menuju pada progres. Proses perubahan dan pembangunan dalam demokratisasi itu dilakukan atas azas-azas berikut ini, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan atau lembaga kenegaraan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab.

Azas berikut ini, demokrasi tidak hanya menjamin hak-hak azasi manusia dan kebebasan kehidupan pribadi saja, tetapi juga menjamin dimensi publiknya yaitu dalam bentuk pertanggungjawaban moral terhadap sesama manusia dan masyarakat. Jadi baik aspek privat maupun aspek public dapat diungkapkan secara bebas dan komplementer.

Tidak secara otomatis demokrasi dapat menciptakan masyarakat harmonis tanpa konflik, karena itu harus terus-menerus diperjuangkan dan disempurnakan bahkan ditingkatkan. Demokrasi justru memungkinkan timbulnya banyak perbedaan, konflik dan masyarakat majemuk yang dinamis sifatnya, dengan banyak perubahan serba cepat, ketegangan, kontras dan perkecambahan. Namun semua itu sudah diperhitungkan bisa ditanggulangi, dan harus bisa dikendalikan secara terencana. Jadi, diutamakan manajemen politik yang baik.

Demokrasi bertujuan membuat kehidupan bersama di masa mendatang menjadi lebih baik, dengan jalan menerapkan prinsip-prinsip demokratis di semua sektor kehidupan. Hal ini mengingat bahwa sampai sekarang masih sempat banyak unsur ketidakadilan dan tirani (terselubung), masih adanya warisan-warisan jaman feodal, yang terus menerus merajalela di muka bumi. Selanjutnya pilihan bangsa kita pada bentuk pemerintahan demokratis sebagai azas dasar bagi kenegaraan itu didukung oleh pertimbangan-pertimbangan seperti berikut ini;

Pertama. Demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk merealisasikan diri dan mengatualkan segenap potensi dan bakatnya, untuk menjadi manusia utam yang menyadari tadulirnya.

Kedua. Demokrasi memberikan kebebasan

penuh untuk berkarya dan berpartisipasi sosial politik di tengah lingkungan sendiri serta masyarakat dalam scope yang lebih luas lagi, sesuai dengan fungsi dan misi hidup setiap orang.

Demokrasi sejati bertentangan dengan kediktatoran, ada manusia seperti Mussolini yang memiliki sedikit rasa hormat terhadap demokrasi. Tapi, seorang seperti Plato menganggap demokrasi sebagai semacam kekacauan yang penuh dengan keragaman, dan ketidak beraturan yang memberi persamaan hak kepada orang yang berderajat sama maupun yang berderajat tidak sama. Sebenarnya, demokrasi tidak sedemikian ekstremnya. demokrasi bukan merupakan hukum rimba, bukan pula hukum yang dibuat hanya oleh satu orang manusia. Ia merupakan jalan tengah, dimana seluruh manusia berbagi tanggung jawab untuk memastikan bahwa ia bekerja dengan benar. (Richard M. Ketchum, 2004-86)

Berikutnya, karena semakin kompleksnya masyarakat modern di Indonesia dan makin banyaknya masalah sosial yang gawat dan masalah politik, maka keterlibatan individu dalam urusan kemasyarakatannya menjadi semakin sulit. Sebagai akibatnya muncul gejala, banyak orang menjadi kurang atau tidak mampu melihat dan memahami dimensi-dimensi individual, kemasyarakatan dan dimensi politiknya. Dia kurang mampu memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai individu, sebagai warga masyarakat dan sebagai warganegara.

Akibatnya, dia kurang mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, sama sekali tidak sanggup mempengaruhi struktur masyarakat dan struktur politik yang ada. Karena itu, dia lebih banyak berfungsi sebagai konsumen yang pasif mengapung di atas arus-arus aliran politik, tanpa kesadaran, tanpa pengertian dan tanpa daya.

Demokratisasi individual dan demokratisasi struktur-struktur kemasyarakatan dan struktur politik itu saling bergandengan, yang satu tanpa yang lain komplementer dan saling melengkapi. Dalam iklim sedemikian itu ada keterlibatan yang lebih akrab antara negara dengan masyarakat, antara pemerintah dengan rakyat. Ada komunikasi terbuka antara kedua



belah pihak, sehingga tercipta hubungan yang saling komunikatif dan saling percaya mempercayai. Sebaliknya, jika komunikasi antara pemerintah dan rakyat buruk, akan membuat orang bingung, saling menuduh dan mencurigai, sehingga timbul banyak kecemburuan sosial.

Keberadaan kelompok kepentingan yang terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam proses pembuatan perumusan kebijakan umum (korporatisme), pemerintah dalam hal ini untuk menjembatani diantara kelompok-kelompok kepentingan. Selanjutnya pada penjelasan ideologis atau kultural yang menganggap negara sebagai suatu organisme yang terdiri atas berbagai unsur yang saling tergantung. Bagaikan organisme tubuh manusia, pemerintah sebagai kepala (pemikir) dan kelompok kepentingan sebagai unsur-unsur tubuh lainnya.

Dalam korporatisme tidak dikenal persaingan bebas dan adanya tekanan terhadap pemerintah, karena seperti tubuh yang sehat ditandai dengan kerjasama harmonis antar unsur-unsur kelompok kepentingan di bawah kendali pemerintah. Demikian pula suatu sistem politik yang sehat yang ditandai dengan kerjasama semua unsur yang serasi secara keseluruhan tunduk pada pemerintah. (Ramlan Surbakti, 1992-105)

Dalam iklim politik yang bernafaskan demokrasi, orang sangat menekankan penggunaan kekuasaan untuk mengambil keputusan bagi kesejahteraan setiap warganegara bukan untuk kelompok elite atau group of excellences yang mendapatkan banyak memberi hak istimewa (privilege) tertentu. Karena itu sangat diutamakan, meningkatkan partisipasi rakyat dalam usaha membangun masyarakat sekitar dan masyarakat negara. Kemudian dalam penerapan kekuasaan, kontrol dan pengawasan oleh individu dan kelompok-kelompok sosial terhadap unsur kekuasaan, agar kekuasaan tidak menjadi sewenang-wenang, sebaliknya beroperasi lebih manusiawi. Selanjutnya diterapkan pendistribusian yang lebih merata dari kekuasaan, kesejahteraan dan keadilan untuk membangun dunia baru yang lebih damai dan sejahtera.

PENUTUP

Negara merupakan hasil persetujuan bersama sejumlah rakyat yang bertekad bulat untuk membangun suatu wadah hidup. Karena itu, negara adalah sesuatu dari, oleh dan untuk sekelompok manusia yang disebut rakyat, maka sudah ada kesadaran politik pada rakyat. Negara sebagai organisasi politik yang berpemerintahan sendiri dan menjalankan kekuasaannya lewat perorangan yaitu kepala negara serta kelembagaannya yang mewakili seluruh rakyat.

Dengan begitu negara tidak hanya menjadi urusan para elite penguasa saja, akan tetapi juga menjadi urusan seluruh rakyat untuk menegakkan, mengatur dan mempertahankan keberadaan negara tersebut.

Manusia itu dalam kondisi bagaimanapun juga, mereka hidup dalam lingkungan sosio-kultural, di tengah struktur masyarakat dan politik yang dibuat oleh mereka sendiri. Akan tetapi, pada saat yang sama orang juga disadarkan bahwasanya setiap orang dibentuk dan diubah oleh struktur-struktur di sekitarnya, yang disebut sebagai determinasi sosial. Oleh karena itu masalah-masalah pribadi atau personal pada hakekatnya dipengaruhi dan ditentukan secara kemasyarakatan, dipastikan bahkan sering didominir secara structural yaitu oleh banyak struktur-struktur dari factor eksternal.

Sebaliknya, bahwa struktur-struktur tadi nyata-nyata dibuat oleh tangan dan akal manusia dan dipertahankan, yang sifatnya bisa benar atau juga bisa salah. Oleh sebab itu, perbuatan dan tanggung jawab politik seseorang itu secara langsung atau tidak langsung pasti mempengaruhi person-person lain di luar dirinya. Jadi setiap pengambilan sikap, keputusan, prinsip dan cara hidup juga mempengaruhi orang lain.

Terjadinya problem - problem kemasyarakatan itu perlu diterjemahkan pula dalam pengertian-pengertian pertanggungjawaban individual, sebab masalah-masalah sosial tersebut mau tidak mau pasti juga mempengaruhi dirinya.

Orang tidak ingin menunjukkan jalan kepada pribadi lain, akan tetapi membantu orang lain tadi menemukan dan melewati jalannya sendiri, dikaitkan dengan pandangan sendiri

dan visi kemasyarakatan yang terbuka. Pandangan hidup yang terbuka itu menonjolkan kebebasan manusia untuk merealisasikan dirinya sendiri yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Maka dari itu individualisasi, demokratisasi, kebebasan personal, semua itu saling bertalian, tidak bisa dipisah-pisahkan, ketiga

hal tersebut segaris dengan gerakan-gerakan emansipasi di bidang demokratisasi politik, ekonomis, social dan kultural. Jadi pada saat individu itu sadar menjadi warganegara, maka dia melakukan perbuatan politik, dengan begitu warganegara tersebut sadar atau tidak sadar merupakan figure politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno.t.th.*Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta:Medpress
- Kartini Kartono, 1996, *Pendidikan Politik*. Bandung:Mandar Maju
- Padmo Wahyono dan Nazarrudin Syamsuddin.1995, *Pengantar Ilmu Politi*. Jakarta:Radar Grafindo Persada
- Rishard M.Ketchhum.2004. *Demokrasi Sebagai Pengantar*. Yogyakarta:Niagara
- Ramlan Surbakti.992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Widiasarana, Indonesia
- Skarna. 1990. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung:Mandar Maju
- Sunny Tanuwijaya. 2010. *Nasib Demokrasi Kita*, *Kompas*, Jakarta.